

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program transmigrasi di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial tahun 1905. Sejak rombongan transmigran diberangkatkan pertama kali sebanyak 155 kepala keluarga dari Pulau Jawa ke daerah Lampung, maka pada masa itulah dianggap sebagai tonggak dimulainya penataan struktur demografi untuk pemerataan distribusi penduduk di Indonesia secara terencana. Transmigrasi merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebarkan populasi masyarakat agar merata dan mengembangkan daerah yang belum terkelola dengan baik. Dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1972).¹

Masyarakat Bali mulai melakukan perpindahan setelah kemerdekaan yakni pada tahun 1953. Puncak dari perpindahan masyarakat Bali keluar dari Pulau Bali terjadi ketika meletusnya Gunung Agung. Pasca letusan gunung tersebut banyak orang Bali dipindahkan keluar dari Pulau Bali yang tergolong memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Persebaran mereka ini tidak sepenuhnya merata karena harus mengikuti prosedur dari pemerintah, seperti ditentukan tempat, daerah, waktu dan jumlah warga.² Kedatangan masyarakat Bali di Kabupaten Konawe Selatan dimulai pada tahun 1968. Kedatangan ini terjadi dikarenakan telah mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah pada tiap daerah di Pulau Bali. Program tersebut adalah untuk memindahkan keluar Pulau Bali, seperti ke Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Masyarakat Bali tersebar ke berbagai wilayah dan salah satu di antaranya berlokasi di Desa Jati Bali,

¹ Presiden Republik Indonesia tentang “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian*”, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.



Aditya, Kuswono. “Transmigrasi Etnis Bali di Kecamatan Seputih (Kajian Historis terhadap Dinamika Relasi Transformasi Sosial dan Sistem Kekerabatan Tahun 1953-1969.” *Jurnal Swarnadwipa*, Vol. 3. 12: 45-57.

Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pada awal kedatangannya kehidupan sosial masyarakat Bali didasarkan atas kesamaan etnis, agama, asal dan budaya sehingga kelihatan unik. Salah satu keunikan mereka adalah kebiasaan dan identitas sosial yang terlihat sangat jelas.³

Sejak kedatangan transmigran asal Bali di Desa Jati Bali, Desa Ramburambu, Desa Mowila, dan Desa Landono di Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam aspek wilayah dan ekonomi masyarakat setempat. Para transmigran Bali membawa serta keahlian mereka dalam bersawah dan berkebun, yang menjadi modal utama untuk beradaptasi dan membangun kehidupan baru di tanah perantauan. Dengan semangat kerja keras dan ketekunan, mereka berhasil mengolah lahan yang sebelumnya belum produktif menjadi areal pertanian yang subur dan menguntungkan. Seiring waktu, banyak di antara mereka yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tetapi juga meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui program transmigrasi serta interaksi yang relatif harmonis dengan masyarakat lokal. Situasi ini mencerminkan tercapainya cita-cita awal para transmigran Bali saat pertama kali tiba di Konawe Selatan membangun kehidupan yang lebih baik melalui kerja, tanah, dan ketekunan.

Pada tahun 1968, Indonesia mengalami lonjakan transmigrasi yang sangat signifikan, di mana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menerapkan berbagai peraturan, proses, prosedur dan mekanisme untuk menggerakkan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tekanan kepadatan penduduk di wilayah Jawa dan Bali dengan memindahkan sebagian penduduknya ke wilayah-wilayah yang masih jarang penduduknya. Pada saat itu, program transmigrasi digagas harapan untuk mengurangi tekanan kepadatan penduduk, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta memperkuat integrasi nasional dengan menghubungkan antarwilayah di Indonesia. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah-



Hariato, Sindung. *"Sosiologi Ekonomi"*. (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1).

wilayah transmigrasi. Proses transmigrasi dimulai dengan pemilihan lokasi yang akan dijadikan tempat pemukiman baru.⁴

Pemerintah memberlakukan prosedur dan mekanisme yang ketat dalam pelaksanaan program transmigrasi. Hal ini mencakup seleksi calon transmigran, persiapan perjalanan, akomodasi di tempat tujuan, serta dukungan dan bantuan lainnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Setiap calon transmigran harus melalui serangkaian tahap evaluasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Setelah tiba para transmigran dihadapkan dengan tantangan besar. Mereka harus mengatasi perbedaan budaya, bahasa, dan lingkungan yang mungkin berbeda dengan daerah asal mereka. Meskipun demikian, semangat perintis dan tekad untuk memulai hidup baru mendorong mereka beradaptasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun setelah transmigran Bali datang terjadilah perubahan toponimi dengan mengganti nama lokal lama dengan nama baru yang memperlihatkan bentuk pemahaman geografis dan adaptasi kebudayaan, dengan mendirikan, misalnya Desa Jati Bali. Wilayah ini menjadi tujuan utama keluarga transmigran dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa dan Bali. Hal ini membantu mengurangi tekanan kepadatan penduduk di pulau-pulau tersebut dan memberikan peluang baru bagi para transmigran untuk mencari kehidupan yang lebih baik.⁵

Program transmigrasi di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda, tetapi dijalankan secara besar-besaran pada masa Orde Baru. Tujuan utamanya adalah mengurangi beban kepadatan di Jawa, Bali, dan Lombok, sekaligus membuka wilayah-wilayah baru untuk pertanian dan pemukiman. Selain itu, transmigrasi juga digunakan sebagai strategi untuk mempererat kesatuan nasional dengan mencampur penduduk dari berbagai suku di wilayah yang sama.

⁴ Arsip, "Pelaksanaan Pengiriman Transmigrasi ke Daerah Sulawesi Tenggara" 1968.



yahrn, dkk "Sejarah Pemukiman Etnis Bali di Desa Jati Bali Kabupaten Selatan" *Jurnal Idea of History*, Fakultas Ilmu Budaya Universita Halu
l 4. No. 2, 2023: 6-8.

Pemerintah memberikan lahan, rumah, dan bantuan hidup awal kepada transmigran. Program ini juga dimaksudkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Transmigrasi sebagai kebijakan alternatif memiliki banyak nilai positif dalam konteks solusi kependudukan dan pembangunan wilayah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, serta kepekaan terhadap aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, transmigrasi tetap relevan jika dijalankan dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif.⁶

Pada tahun 1968 jumlah transmigrasi di Bali di Konawe Selatan terdapat di beberapa lokasi, di antaranya di Desa Jati Bali dengan jumlah kepala keluarga 150 jiwa dan di Desa Ramburambur dengan jumlah 150 jiwa kepala keluarga, dengan total keseluruhan 300 jiwa kepala keluarga untuk gelombang pertama pada periode tahun 1968. Berdasarkan data transmigrasi pada bulan oktober 1968, dari daerah Provinsi Jawa Barat 150 kepala dan 150 kepala keluarga dari daerah Provinsi Bali. Pada tanggal 14 oktober 1971 terjadi transmigrasi periode kedua yang ditempatkan di Desa Landono sebanyak 50 kepala keluarga, dan di Desa Mowila sebanyak 50 keluarga dengan total keseluruhan 100 kepala keluarga.⁷

Kedatangan para transmigran di Konawe Selatan telah mengalami berbagai tantangan, mulai dari sosial, ekonomi dan juga budaya. Tantangan sosial yang dihadapi transmigran mencakup penyesuaian dengan lingkungan baru, interaksi dengan masyarakat lokal, serta dinamika internal di antara para transmigran sendiri. Tantangan ekonomi merupakan salah satu hambatan terbesar yang dihadapi transmigran. Meskipun pemerintah menyediakan lahan dan rumah, tidak semua daerah transmigrasi memiliki kondisi tanah yang subur atau akses terhadap pasar. Tantangan budaya tidak hanya terjadi antara transmigran dan penduduk lokal, tetapi juga dalam proses internalisasi budaya kerja dan hidup di lingkungan baru. Pertama, perbedaan sistem nilai dan



Levang, P. *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003:17-19).

Arsip Pelaksanaan Pengiriman Transmigrasi...(1968).

pandangan hidup antara transmigran dan penduduk lokal kadang menimbulkan ketegangan. Misalnya, cara bercocok tanam, ritual keagamaan, dan relasi sosial yang berbeda dapat menimbulkan prasangka.⁸

Secara umum tantangan sosial banyak transmigran adalah kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi geografis dan iklim yang sangat berbeda. Selain itu, perbedaan adat dan kebiasaan antara transmigran dan penduduk lokal sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Dalam beberapa kasus, konflik terbuka terjadi akibat persaingan sumber daya atau perasaan marginalisasi dari penduduk asli. Kedua, dari segi internal, transmigran juga mengalami kesulitan dalam membentuk keserasian sosial. Mereka berasal dari berbagai latarbelakang budaya, yang meskipun satu bangsa, memiliki bahasa, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Tantangan budaya tidak hanya terjadi antara transmigran dan penduduk lokal, tetapi juga dalam proses internalisasi budaya kerja dan hidup di lingkungan baru. Di daerah asal, mereka mungkin terbiasa bekerja di lahan yang sudah subur dan terintegrasi dengan pasar, sedangkan di daerah transmigrasi mereka dituntut menjadi pionir yang harus membuka hutan, membangun rumah, dan menata lahan dari nol. Perubahan ini memerlukan ketahanan mental dan fleksibilitas budaya yang tinggi.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nyoman Kacir, beliau mengatakan bahwa “relasi sosial, ekonomi serta kultur untuk kerjasama itu terbentuk atas dasar kepentingan bersama, misalkan saja seperti gotong royong dalam proses pembersihan parit, saluran air, memperbaiki jalan dan lain sebagainya. Selain itu, tidak hanya dalam urusan kebersihan saja, menurut beliau kalau ada proyek pekerjaan yang berkaitan dengan urusan ekonomi seperti membuat parit biasanya dia juga terlibat dalam bekerjasama dengan masyarakat setempat dengan sistem borongan”. Dari hasil wawancara dilapangan bahwa kedatangan orang Bali di Kabupaten Konawe Selatan tidak serta merta mampu beradaptasi baik dengan penduduk lokal, misalkan saja dalam hal kebudayaan dimana orang Bali sangat membutuhkan waktu beberapa tahun agar mereka bisa beradaptasi dan terbiasa dengan kebudayaan penduduk lokal.



Wawancara: I Made Budiarta, Masyarakat Bali, Kabupaten Konawe
10 Mei 2025.

Levang, P. *Ayo ke Tanah...*(2003: 111-115).

Terjadinya akulturasi budaya yang merupakan suatu pertanda adanya kerukunan antaretnik yang terdapat di Konawe Selatan, hal ini terjadi karena di dalam hidup dan kehidupan sebagai warga masyarakat, terutama dalam berinteraksi antar etnik mereka saling menghormati terutama menghormati perbedaan di antara mereka, baik dalam kultur maupun dalam agama (aqidah), sehingga mereka mudah beradaptasi dan hidup rukun antara mereka walaupun mereka berbeda dalam segala hal. Benih konflik tidak akan pernah dan tidak mudah terjadi selama mereka sadari adanya suatu perbedaan dan menghormati perbedaan tersebut. Kondisi seperti ini yang menimbulkan istilah yang merupakan simbol kerukunan dalam pergaulan antar warga yang terdapat di Kabupaten Konawe yang terkenal dengan sapaan “teman”.

Etnik Bali selalu melakukan penyesuaian diri dengan kondisi masyarakat setempat, baik dalam sebagian kultur, maupun dalam masalah sosial lainnya agar kehadirannya mudah diterima oleh masyarakat setempat. Etnik ini terkenal penolong, selalu merendah pada suatu yang tidak berkenan, memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mereka rata-rata memiliki standar ekonomi yang mapan. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, orang Bali di Kabupaten Konawe Selatan telah banyak terlibat langsung dalam kegiatan perpolitikan, dari hasil wawancara bersama Bapak I Made Budiarta beliau adalah Kepala Desa langsung, menyampaikan bahwa bisa di lihat secara langsung dimana di salah satu kampung terdapat perkampungan orang Bali yang mempunyai 95% adalah penduduk orang Bali asli, di kampung ini telah banyak menjadi Pns, Guru, Polri dan mempunyai Kepala Desa sendiri dari orang Bali asli.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ketut Sutapa sejak awal kedatangan mereka pada tahun 1968, selama beberapa bulan mereka masih menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah, dimana selama 6 bulan pemerintah berperan penting dalam kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat transmigrasi. Peran pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, tetapi segala bantuan telah diberikan untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat transmigrasi. Setelah 6 bulan diberi bantuan pemerintah,



Wawancara: I Made Budiarta, Masyarakat Bali, Kabupaten Konawe
10 Mei 2025.

maka mereka mulai hidup dan beradaptasi oleh lingkungan dan penduduk lokal, setelah itu tidak ada lagi masukan yang di berikan oleh pemerintah, dimana mereka harus bekerja dengan mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hasil observasi dan wawancara bahwa orang Bali dalam pertama kali bekerja dan mengantungkan hidupnya, yaitu dengan bekerja sebagai bertani dan beternak, bertani adalah pekerjaan mereka dengan menanam berbagai macam tanaman, seperti cabe rawit, sayur-sayuran dan lainnya. Selanjutnya bekerja sebagai beternak babi, hal ini terlihat dengan kandang ternak babi yang di miliki oleh tiap tiap masyarakat Jati Bali yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, peternakan babi yang berada di Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu usaha yang digeluti oleh sebagian masyarakat yang sudah berdiri cukup lama di dekat pemukiman penduduk, usaha peternak babi sudah cukup lama dilakukan bahkan awal pertama orang Bali melakukan perjalanan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan, usaha peternak babi menjadi salah satu penghasilan terbesar mereka setelah bertani, dimana babi bisa berkembang biak dengan baik sebanyak 8 hingga 12 dengan masa perawatan selama 6 bulan hingga bisa di jual.

Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “**Relasi Sosial, Ekonomi dan Politik: Studi Tentang Transmigran Bali di Konawe Selatan, 1968-2020**”. Judul ini menarik untuk penulis telah dan di teliti tentang bagaimana proses relasi sosial transmigran yang dilakukan oleh orang Bali.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Transmigrasi orang Bali di Kabupaten Konawe Selatan merupakan bagian dari program nasional yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan demografis dan mendorong pembangunan wilayah luar Jawa. Program ini sudah dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda, yang menyebutnya sebagai kolonisasi penduduk, namun mencapai puncaknya pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah Presiden Soeharto. Dalam konteks Bali, transmigrasi menjadi solusi terhadap tekanan penduduk dan keterbatasan lahan.



li memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi ketersediaan lahan i terbatas karena kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dan nian. Oleh karena itu, banyak orang Bali yang terdorong untuk ikut

transmigrasi dengan harapan mendapat lahan pertanian yang luas dan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu daerah tujuan yang dipilih pemerintah adalah Sulawesi Tenggara, yang saat itu masih tergolong wilayah terpencil dan kurang berkembang. Pemerintah mengalokasikan kawasan tertentu seperti Kabupaten Konawe Selatan. Orang Bali yang ikut dalam program transmigrasi pada umumnya melewati proses seleksi dan pelatihan dasar di Bali, sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Setibanya di Sulawesi Tenggara, mereka disambut dengan kondisi alam yang keras: tanah yang belum dibuka, cuaca ekstrem, dan minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Setiap keluarga transmigran biasanya mendapat dua hektare lahan: satu hektare untuk lahan pekarangan dan tempat tinggal, dan satu hektare untuk lahan usaha. Rumah-rumah yang disediakan pemerintah berbentuk rumah panggung sederhana dengan atap seng atau rumbia.¹¹

Seiring waktu, komunitas Bali di Kabupaten Konawe Selatan tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial. Mereka dikenal sebagai petani ulet yang berhasil mengelola lahan menjadi produktif. Banyak yang beralih dari pertanian subsisten menjadi petani kakao, kelapa, dan padi sawah. Beberapa transmigran juga menjadi pedagang, guru, dan tokoh masyarakat. Ransmigrasi orang Bali ke Sulawesi Tenggara mencerminkan kompleksitas program transmigrasi nasional: menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, dan ideologis. Dari sejarah ini dapat diambil pelajaran tentang pentingnya kesiapan sosial-budaya dalam migrasi, serta perlunya pendekatan inklusif dalam pembangunan wilayah multietnis.¹²

Sepanjang kedatangan orang Bali di Kabupaten Konawe Selatan, telah banyak cerita panjang dan perubahan yang terjadi secara signifikan. Perjalanan panjang dan perubahan itu hadir menggiringi perjalanan selama 55 tahun di Kabupaten Konawe Selatan, hadir sebagai masyarakat transmigrasi. Semenjak tahun 1968 ketika pertama kali datang dari pulau Bali dan Jawa Barat, telah



Arifin, Evi Nurvidya. "Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Prospek." *pendudukan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2007: 4.

Levang, P. *Ayo ke Tanah...* (2003: 120-135).

mengalami progres-progres yang cukup memadai dan juga mengalami perkembangan, walaupun tidak begitu mudah bagi mereka untuk hidup dan beradaptasi dengan daerah baru dan penduduk lokal.

Dari ulasan pengantar (latar belakang) yang telah diuraikan di atas, penulis mendasari penelitian ini dengan pertanyaan khusus untuk menggambarkan dialektika sejarah “Relasi Sosial, Ekonomi dan Politik: Studi Tentang Transmigran Bali di Konawe Selatan, 1968- 2020

- a. Bagaimana proses pembentukan relasi sosial, politik dan ekonomi transmigran Bali di Kabupaten Konawe Selatan?
- b. Bagaimana adaptasi kebudayaan transmigran Bali di Kabupaten Konawe Selatan?

Dari sisi temporal, penelitian ini mencakup rentang waktu dari tahun 1968 hingga 2020. Tahun 1968 dipilih sebagai titik awal karena merupakan periode kedatangan awal masyarakat Bali ke wilayah tersebut dalam kerangka program transmigrasi nasional. Proses ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat yang saat itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan integrasi nasional melalui pemindahan penduduk antarpulau. Pelaksanaan transmigrasi ini juga tidak lepas dari dasar hukum yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pokok-Pokok Ketransmigrasian.¹³ Yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. Namun, praktik transmigrasi telah berlangsung sejak sebelum undang-undang tahun 1972 diberlakukan, yakni berdasarkan keputusan-keputusan presiden dan instrumen hukum lainnya yang mengatur pemindahan penduduk.¹⁴

Sementara itu, tahun 2020 dipilih sebagai batas akhir studi karena mencerminkan sebuah periode transisi kontemporer, sekaligus menutup lima dekade proses interaksi yang cukup representatif untuk dianalisis secara menyeluruh. Tahun ini juga menandai munculnya berbagai perubahan signifikan



¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pokok-Pokok Ketransmigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

baik di tingkat lokal maupun nasional, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang mengubah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok transmigran. Dengan menjadikan 2020 sebagai batas temporal, studi ini mencakup seluruh rentang sejarah penting mulai dari awal kolonisasi pemukiman, masa Orde Baru, reformasi, hingga tantangan global terbaru. Selain itu, data hingga tahun 2020 cenderung lebih stabil dan dapat diverifikasi melalui dokumen lapangan, wawancara, dan catatan pemerintah daerah sebelum terganggu oleh keterbatasan mobilitas dan pengumpulan data akibat pandemi. Oleh karena itu, batas tahun 2020 dipilih sebagai titik ideal untuk memberikan gambaran utuh dan relevan tentang transformasi relasi sosial, ekonomi, dan politik yang telah terjadi antara masyarakat transmigran Bali dan penduduk lokal di Kabupaten Konawe Selatan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Studi penelitian ini membahas tentang Relasi Sosial, Ekonomi Dan Politik: Studi Tentang Transmigran Bali di Konawe Selatan, 1968-2020, yang awalnya berasal dari pulau Bali dan Jawa Barat kemudian melakukan transmigrasi yang telah di programkan oleh pemerintah. Dengan beragam variabel, serta memperhatikan proses kronologisnya, yang bertujuan:

Pertama, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Bali menjalani proses transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah. Transmigrasi tidak hanya menjadi solusi atas kepadatan penduduk di wilayah tertentu, tetapi juga berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan, mempererat persatuan nasional, dan menjaga stabilitas sosial. Sejak tahun 1968, masyarakat Bali tercatat sebagai salah satu komunitas yang secara aktif mengikuti program ini. Di Konawe Selatan, mereka ditempatkan di zona-zona transmigrasi yang telah disiapkan pemerintah, lengkap dengan rumah tinggal, lahan pertanian, dan akses ke layanan publik. Namun, tantangan besar menanti mereka karena lahan yang diterima sering kali masih berupa hutan atau tanah marginal yang belum siap garap. Selain itu, mereka juga harus menghadapi dalam beradaptasi dengan iklim yang berbeda, kondisi alam yang asing, minimnya infrastruktur dasar di masa-masa awal kedatangan.



Kedua, Penelitian ini secara metodologis bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Bali yang merantau ke Kabupaten Konawe Selatan melalui program transmigrasi berhasil bertahan dan berkembang di wilayah baru. Fokusnya tidak hanya pada proses pemukiman itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor penting yang mendorong keberhasilan mereka dalam membentuk kehidupan yang mapan. Penelusuran terhadap jejak perjalanan mereka dari Bali dan Jawa Barat hingga ke Konawe Selatan menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Penelitian ini juga menyoroti interaksi masyarakat Bali dengan kelompok lain dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, termasuk berbagai persoalan dan tantangan yang mereka hadapi selama tinggal di wilayah tersebut.

Ketiga, Secara historiografis, studi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang sejarah sosial masyarakat Bali yang mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan dalam rentang waktu 1968 hingga 2020. Fokus utamanya tidak terbatas pada pencatatan kronologis peristiwa, melainkan pada penafsiran terhadap dinamika relasi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang seiring waktu. Dengan mengangkat tema "Relasi Sosial, Ekonomi, dan Politik: Studi tentang Transmigran Bali di Konawe Selatan", penelitian ini menegaskan bahwa sejarah memiliki relevansi kontekstual yang kuat terhadap kondisi masyarakat masa kini, sekaligus menjadi sarana refleksi dalam menghadapi persoalan kontemporer.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi komparatif bagi studi-studi sejenis, baik bagi mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat luas yang memiliki minat terhadap kajian sejarah sosial dan transmigrasi. Dengan menyuguhkan narasi historis yang bersumber dari pengalaman lokal namun tetap terhubung dengan konteks nasional, kajian ini menawarkan sudut pandang alternatif dalam memahami dinamika pembangunan dan mobilitas penduduk di Indonesia. Dalam konteks perdebatan kontemporer terkait identitas, integrasi sosial, dan keberagaman budaya, pengalaman

masyarakat Bali sebagai transmigran di Konawe Selatan menghadirkan pelajaran tentang daya tahan, adaptasi, dan pentingnya dialog lintas budaya dalam membangun harmoni sosial. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan dalam literatur sejarah lokal, yang selama ini kurang mendapat porsi



dalam narasi historiografi nasional. Kisah masyarakat Bali di Konawe Selatan merepresentasikan salah satu fragmen penting dalam sejarah modern Indonesia, menjadikannya bukan sekadar rekaman perjalanan satu kelompok, melainkan refleksi dari proses panjang pembentukan identitas dan kehidupan bersama dalam bingkai keberagaman bangsa¹⁵

1.4. Tinjauan Pustaka

Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem pembagian kekuasaan negara pasca era reformasi, terutama sekali tentang munculnya dan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999, memberi peluang bagi otonomi daerah yang luas. Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, orientasi pembangunan kemudian berubah menjadi prinsip atas dasar kemandirian dan keadilan. Akibat kondisi tersebut, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan pun bergeser ke arah pembangunan yang desentralistik. Salah satu implikasi (dampak) dari format pembangunan yang desentralistik ini, menimbulkan munculnya fenomena pemekaran wilayah.¹⁶

Selanjutnya jurnal Solidaritas Sosial Masyarakat Transmigran Bali (Kasus Kelurahan Ngkari- Ngkari Kecamatan Bungi Kota Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara) yang di tulis oleh Silda dkk. Pada jurnal ini menjelaskan masyarakat transmigran Bali yang ada di Ngkaringkari mau bekerjasama atau gotong royong bukan berdasarkan kemauan sendiri namun dikarenakan adanya aturan yang bernama “awig” yang jika tidak mengikuti aturan maka semua masyarakat akan dikenakan sanksi berupa denda terkecuali masyarakat yang berstatus sebagai janda dan lansia. Dalam masyarakat transmigran Bali yang ada di Ngkari-ngkari terdapat aturan yang wajib ditaati masyarakat setempat yang di kontrol oleh ketua



¹⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* Gramedia, 1992: 60-82).

Dokumen Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

banjar. Dimana pada masyarakat yang tinggal di banjar yang sama dengan orang yang meninggal maka masyarakat tersebut wajib untuk menyumbang pada ketua banjar sebesar 35 ribu dan yang nantinya akan diberikan kepada keluarga orang yang meninggal. Masyarakat transmigran Bali yang ada di Ngkari-ngkari saat ini mulai menekuni pekerjaan lain berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pekerjaan sebagai petani tetap ditekuni hingga saat ini. Transmigran orang Bali yang ada di Ngkari-ngkari bertindak berdasarkan nilai yang dilakukan dan dipraktikkan untuk alasan dan tujuan yang memiliki keterkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang memiliki keterkaitan dengan berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Tindakan sosial yang umum dilakukan adalah tindakan rasionalitas nilai.¹⁷

Selanjutnya pula jurnal “Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan” yang ditulis oleh Arsalim. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Transmigrasi di konawe selatan diarahkan untuk antara program pengembangan permukiman dan lingkungan transmigrasi dengan menyiapkan permukiman transmigrasi baru, termasuk untuk para petani berpindah dan perambah hutan dan mengembangkan permukiman transmigrasi yang telah ada. Program ini dilaksanakan dengan menyiapkan areal bagi pembangunan permukiman transmigrasi, yang umumnya semula merupakan areal hutan yang dapat dikonversi, lalu membuat rencana pengembangan jangka panjang dan menengah serta rencana teknis tata ruang permukiman yang disesuaikan dengan rencana umum tenaga ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dan rencana umum tenaga ruang kabupaten Konawe Selatan. Selain itu pula dilaksanakan pembangunan jaringan jalan, pembukaan lahan,



Silda dkk, “Solidaritas Sosial Masyarakat Transmigran Bali (Kasus n Ngkari-Ngkari Kecamatan Bungi Kota Baubau Provinsi Sulawesi),” *Jurnal of Sociology (HJS)*, Vol. 3, No. 2, 2021: 109-112.

pengukuran dan pengkaplingan, pembangunan rumah beserta sarana dan prasarana permukimannya, serta fasilitas umum lainnya.¹⁸

Selanjutnya jurnal “Analisis Komparatif Kondisi Sosial Ekonomi Transmigrasi Jati Bali Dengan Transmigrasi Abenggi Di Kabupaten Konawe Selatan” yang di tulis oleh Hadi Sabari Yunus dan Su Ritohardoyo. Pada jurnal ini menjelaskan perbedaan sosial ekonomi antara transmigrasi berasal pulau Bali yang di tempatkan di Desa Jati Bali, dan transmigrasi orang bali yang berasal dari jawa barat yang di tempatkan di Desa Ahenggi. Dalam tulisan ini menguraikan perbedaan sosial ekonomi yang relatif jauh berbeda antara masyarakat Bali di Desa Jati Bali dan masyarakat Bali yang berada di Desa Ahenggi. Orang Bali yang berada di Desa Jati Bali memiliki pendapatan kisaran satu juta sampai dua juta rupiah perbulan yakni sebesar 47 persen. Hal yang berbeda dengan pendapatan transmigran Abenggi yang sebesar 53 persen hanya berpendapatan dibawah satu juta saja. Tidak haanya itu kualitas rumah transmigran Jati Bali dan Abenggi memiliki tren yang berkebalikan Apabila kualitas rumah transmigran Jati Bali sebesar 53 persen dalam kategori baik, kualitas rumah transmigran Abenggi justru hanya 13 persennya saja. Kecenderungan sebagian besar transmigran Jati Bali sebesar 70 persen memiliki harta lebih dari empat juta rupiah, sementara transmigran Abenggi justru sebesar 52 persen rumah tangganya hanya memiliki harta kurang dari kisaran dua juta rupiah. Transmigran di kedua lokasi tersebut masih memiliki lahan pada kisaran satu sampai dua hektar.¹⁹

1.5. Kerangka Konseptual dan Teoretis

Kerangka konseptual dan teoretis (fikir) yang disusun berikut ini adalah berangkat dari pertanyaan utama penelitian yakni Bagaimana Relasi Sosial Ekonomi Terbentuk Ketika Transmigran Bali Datang di Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana adaptasi kultural membentuk masyarakat heterogen,

¹⁸ Arsalim, “Analisis Kebijakan Program Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan,” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2020: 71-72.

¹⁹ Hadi Sabari Yunus dan Su Ritohardoyo, “Analisis Komparatif Kondisi onomi Transmigran Jati Bali Dengan Transmigran Abenggi Di Kabupaten Selatan.” *Jurnal Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 23. No. 2, 2009: 127-



hubungan politik dan dampak dari perjumpaan. Kerangka fikir itu disusun dengan memperhatikan konsep dan teori sosial yang relevan serta memperhatikan realitas sosiologis-historis pada periode penelitian yang dikaji. Tanpa kerangka konseptual dan teoretis (fikir), tidak ada butir-butir referensi untuk membentuk naratif, eksplanasi dan argumentasi.

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lalu. Masa lalu selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan dan kesinambungan.²⁰ Dalam hal meneliti tentang konsep-konsep dasar dari sejarah ini diperlukan sebuah pendekatan dari ilmu-ilmu sosial yang lainnya untuk menopang penelitian sejarah agar menjadi lebih bervariasi. Karena kedudukan sejarah dan ilmu-ilmu sosial (habasa, geografi, ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dll) adalah saling memerlukan dan saling memberikan kontribusi. Dalam hal ini, penelitian dan penulisan sejarah senantiasa memerlukan ilmu-ilmu sosial yang lainnya untuk mengungkapkan data, analisis dan kesimpulan yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terkait dengan manusia dan waktunya.²¹

Berangkat dari hal tersebut, penulis menetapkan beberapa konsep dan teori untuk menjadikan arah penelitian ini semakin terarah sebagai berikut.

Pertama, Konsep Transmigrasi. Transmigrasi merupakan salah satu peluang untuk mengubah nasib untuk memperoleh hidup yang lebih layak, meskipun pada tahap awal peserta transmigrasi menghadapi banyak masalah dan tantangan. Di tempat yang baru, transmigran memiliki peluang usaha khususnya di bidang pertanian karena adanya lahan pertanian dan perkebunan yang disediakan pemerintah. Standar luas lahan pertanian yang diberikan pemerintah secara Cuma-Cuma setiap kepala keluarga adalah seluas dua hektare. Selain rumah tinggal dan pembangunan fasilitas umum seperti rumah



Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,).

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial...* (1992: 8).

ibadah, sekolah, sarana medis serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, warga transmigran memperoleh bantuan perbekalan atau jaminan hidup.²²

Tujuan pokok program transmigrasi yang termuat dalam UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi diharapkan tidak sekedar pemindahan penduduk, tetapi juga sebagai upaya untuk pengembangan wilayah, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting, seperti yang tertuang dalam penjelasan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997. UU tersebut menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi diarahkan sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.²³

Transmigran adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam program transmigrasi. Sebagai bagian dari program ini, transmigran sering kali dihadapkan pada proses adaptasi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah tujuan. Daerah transmigran merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat transmigran maupun non transmigran. Masyarakat transmigran adalah masyarakat yang mengikuti program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia²⁴ Proses transmigrasi melibatkan adaptasi yang

²² Umi Yuminarti, "Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah Dan Harapan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Universitas Papua, Vol. 12, No. 1, 2017: 20.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.



ardiansyah, dkk. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah ran," Oikos Nomos: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 53.

kompleks, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Para transmigran sering kali menghadapi tantangan dalam berintegrasi dengan masyarakat lokal, terutama karena adanya perbedaan budaya, bahasa, dan sistem nilai. Namun, program transmigrasi juga membuka peluang interaksi sosial yang dapat memperkaya dinamika sosial di wilayah tujuan.²⁵ Konsep transmigran memiliki keterkaitan yang erat dengan judul penelitian “Relasi Sosial, Ekonomi Dan Politik: Studi Tentang Transmigran Bali Di Konawe Selatan, 1968-2020” karena penelitian ini membahas proses pembentukan relasi sosial dan ekonomi transmigran Bali di kabupaten konawe selatan, dan adaptasi kebudayaan, sosial, dan politik membentuk masyarakat heterogen dan dampaknya bagi penduduk lokal. Transmigrasi sendiri adalah program perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam prosesnya, para transmigran membawa budaya, tradisi, dan gaya hidup khas daerah asal mereka, yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal maupun dengan kelompok transmigran lain. Oleh sebab itu, memahami konsep transmigrasi menjadi penting untuk mengkaji bagaimana interaksi sosial terbentuk, berkembang, dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di daerah tujuan.

Kedua, Konsep Kemasyarakatan. Menurut Soejono Soekanto, masyarakat atau komunitas adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.²⁶ Sementara itu menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul (berinteraksi) menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama²⁷. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terikat oleh berbagai kebutuhan dan dipengaruhi oleh

²⁵ Suyanto, B. *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2002: 14).



²⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. 1986: 9).

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1975: 1).

berbagai ideal, kepercayaan, dan tujuan, dan tergabung dalam berbagai kesatuan kehidupan bersama. Definisi utamanya adalah “kehidupan bersama”. Kehidupan bersama adalah jenis kehidupan di mana kelompok orang hidup bersama di tempat tertentu, berbagi iklim, identitas, kesenangan, dan kesedihan²⁸.

Konsep masyarakat ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, yang akan mengkaji relasi sosial antara transmigran Bali dan penduduk lokal di Kabupaten Konawe Selatan, yang tentu melibatkan hubungan antar individu dan kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Relasi sosial yang terjadi di antara masyarakat transmigran ini mencerminkan upaya individu dari masyarakat lokal saling memenuhi kebutuhan sosial mereka, beradaptasi, dan membangun kehidupan bersama yang harmonis meskipun ada perbedaan dalam budaya dan asal-usul. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami dinamika masyarakat dan hubungan sosial antar kelompok dalam kerangka sosial yang lebih luas, sesuai dengan konsep masyarakat yang saling bergantung dan terhubung.

Ketiga Relasi sosial merupakan suatu kajian pokok. Setiap mental manusia yang diwujudkan dalam aspek kognisi, emosi, dan perilaku sebenarnya akan selalu muncul ketika individu melakukan interaksi dengan pasangan relasinya. Individu akan memprediksi konsekuensi dari perilaku yang akan ditampilkan kepada individu lain, akan menarik asumsi atas perilaku individu lain, akan terbawa arus emosi individu lain, akan mengidentifikasi situasi individu lain. Maka pada dimensi impersonal mental manusia hanya dapat dipresentasikan melalui eksistensi individu lain, baik sebagai pasangan relasi maupun pasangan interaksi.²⁹

Dalam Teori Sosiologi Modern edisi keenam, George Ritzer menegaskan bahwa relasi sosial merupakan konsep sentral dalam berbagai teori sosiologi. Relasi sosial dipahami sebagai jaringan interaksi antarindividu maupun

²⁸ Handoyo Eko, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Omah, 2015: 21).

Faturochman & Nurjaman, *Psikologi relasi sosial*. (Pustaka pelajar: ta, 2018: 5).



antarkelompok yang dibentuk oleh nilai, norma, kekuasaan, simbol, dan struktur sosial. Dalam pendekatan struktural fungsional, relasi sosial menopang keteraturan melalui pembagian peran dan fungsi yang saling melengkapi. Sebaliknya, dalam pendekatan konflik, relasi sosial menjadi arena dominasi dan pertentangan kepentingan, khususnya dalam hal distribusi sumber daya. Sementara itu, teori interaksionisme simbolik menekankan bahwa relasi sosial terbentuk secara dinamis melalui proses interaksi bermakna dan negosiasi simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Relasi sosial tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan dan wacana yang membentuk cara berpikir kelompok dan bertindak individu. Dengan demikian, relasi sosial tidak hanya mencerminkan keteraturan sosial, tetapi juga menjadi ruang terjadinya perubahan. Memahami relasi sosial sangat penting untuk membaca dan menganalisis dinamika masyarakat modern yang kompleks, karena melalui relasi sosial struktur sosial terbentuk, dipertahankan, dan diubah.³⁰

Relasi sosial dibagi menjadi tiga macam, pertama relasi interpersonal merupakan hubungan antara satu individu dengan individu lain. Relasi interpersonal dikategorikan menjadi tiga bentuk. Pertama, relasi komunal yang merujuk pada kesatuan tanpa terdiferensiasi, misal seperti pertemanan. Kedua, relasi kolegal merujuk pada kesetaraan yang kerap kali ditandai dengan adanya pertukaran yang dilakukan secara adil, misal seperti relasi antara karyawan. Ketiga, relasi hierarkis menekankan otoritas dan kuasa individu terhadap individu lain, seperti relasi antara orangtua dengan anak.³¹

Relasi sosial merupakan interaksi sosial yang didasari oleh rasa simpati, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Bagaimanapun relasi sosial juga merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan juga saling mempengaruhi yang didasarkan pada kesadaran setiap individu untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih elasi sosial yaitu terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang akan membentuk suatu pola,



Rizer George, *Teori Sosiologi Modern*. Kencana (Jakarta, 2004).

Faturochman & Nurjaman. *Psikologi relasi sosial...*(2018: 8).

pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu relasi sosial asosiatif dan disosiatif. Relasi juga bagian dari kebutuhan dasar psikologis manusia yang merupakan hakikat yang tidak dapat dimanipulasi. Pandangan ini didasarkan atas fakta historis yang diyakini oleh mayoritas umat manusia dengan agama ibrahimiyyah, yakni kehadiran Hawa dalam kehidupan Adam. Dari kacamata psikologis, Hawa tidak lain merupakan representasi kebutuhan Adam akan sebuah relasi dengan derajat urgensi yang sama tingginya dengan kebutuhan biologis. Pengaruhnya, manusia sebagai anak cucu Adam juga membutuhkan relasi sosial di dalam perjalanan hidupnya. Apalagi setelah terjadi kontemporer media relasi sosial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dunia seolah dibelah menjadi dua dimensi antara nyata dan tidak nyata, akhirnya batas-batas relasi sosial menjadi lebih permeabel.³²

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa relasi sosial merupakan interaksi hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong demi mewujudkan kehidupan yang baik dan mempunyai rasa peduli antara individu satu dengan individu lainnya. Relasi sosial merupakan interaksi yang terjadi antara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Relasi ini menjadi dasar terbentuknya struktur sosial, norma, dan budaya yang ada dalam suatu komunitas. Melalui relasi sosial, manusia saling memengaruhi, bekerja sama, berkonflik, dan membangun pemahaman satu sama lain. Relasi sosial tidak hanya mencakup hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam masyarakat. Relasi sosial memiliki beberapa ciri, seperti adanya interaksi yang berulang, keterlibatan emosi, serta adanya tujuan bersama atau pengaruh timbal balik. Faktor-faktor yang memengaruhi relasi sosial antara lain nilai, norma, status sosial, komunikasi, dan lingkungan sosial.

Keempat, Teori Perubahan. Tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah kecuali perubahan. Segala sesuatu mengalir. Berubah atau mati. Itulah ungkapan-ungkapan populer tentang perubahan. n-ungkapan tersebut diantaranya datang dari seorang filosof Yunani



Faturochman & Nurjaman. *Psikologi relasi sosial...* (2018: 5).

bernama Heraclitus (544 SM-483 SM). Ungkapan Heraclitus tersebut menunjukkan bahwa perubahan merupakan fenomena hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Siapapun akan terlibat dalam perubahan. Suka atau tidak, dikehendaki atau tidak.

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga dapat berarti bahwa segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat aslinya.³³ Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengertian perubahan sosial, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perubahan sosial yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat mengalami kemajuan, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Maka dari itu perubahan sosial yang dibahas di sini adalah perubahan sosial berdasarkan penyebabnya yakni perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan.

Contoh perubahan sosial yang direncanakan seperti adanya rencana pemerintah dalam program pembangunan masyarakat melalui sistem KB (Keluarga Berencana). Perubahan sosial yang direncanakan adalah suatu bentuk perubahan yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Perubahan ini biasanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti pemerintah, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya,

1.6. Metode Penelitian dan Sumber

Suatu penelitian selalu dibarengi dengan metode, apalagi dalam penelitian studi sejarah. Metode yang digunakan adalah metode yang direduksi dari metode umum yang sering digunakan oleh para peneliti sejarah. Proses utama yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber yang disebut dengan



Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Bumi Aksara,

heuristik, sebab sejarah suatu daerah tidak mungkin dapat ditulis tanpa adanya sumber dalam bentuk tulisan. Sumber yang dipakai dalam tulisan ini baik sumber primer dan sumber sekunder, dikumpulkan dari badan kearsipan dan perpustakaan yang berada di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Sumber primer dikumpulkan berupa arsip yang berada di Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan arsip-arsip yang tersedia secara online di laman Natinaal Archief. Selain itu, ada pula sumber-sumber sekunder yang dikumpulkan dari data yang tersedia dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi, jurnal, buku, surat kabar dan berita-berita online.

Pembandingan sekaligus sebagai pelengkap data tercetak, visual adalah wawancara dengan para pelaku dan saksi sejarah. Narasumber dapat berasal dari lapisan mana saja yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Sejarah lisan diharapkan mampu menghadirkan sejarah orang kebanyakan, sekaligus memberi peluang dalam mengumpulkan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.³⁴

Narasumber untuk wawancara pada penelitian ini berupa tokoh-tokoh masyarakat Bali yang telah menyaksikan langsung perjalanan panjang transmigrasi dari pulau Bali ke daerah Kabupaten Konawe Selatan, kemudian masyarakat-masyarakat Bali, kemudian kepala pemerintah setempat yang ikut serta terlibat langsung dalam menyaksikan perjalanan panjang transmigrasi, kemudian para informan masyarakat setempat.

Untuk literatur-literatur sekunder yang telah digambarkan sederhana pada tinjauan pustaka serta jurnal pendukung dalam penulisan ini diperoleh dari Laboratorium Sejarah dan Budaya, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Kabupaten Konawe Selatan, Perpustakaan Sulawesi Tenggara. Jurnal kesejarahan Indonesia serta literatur perpustakaan pribadi penulis.



Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru rafi Indonesiasentris", dalam Sunaryo Purwo Sumitro, *Dari Samudera Yogyakarta. Persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, (Jakarta: MSI-Sinergi Press, 2002: 135-161).

Setelah berbagai sumber didapatkan, kemudian melakukan kritik terhadap sumber sumber yang telah dikumpulkan kemudian menguji tingkat kredibilitasnya dengan cara mempertanyakan kapan sumber itu dibuat, sehingga tidak keluar dari ruang lingkup waktu yang sedang dikaji; dimana sumber itu dibuat (lokasi); siapa yang membuat (pengarang/penulis); dan dari bahan apa sumber itu dibuat (analisis); apakah sumber itu dalam bentuk asli (autentik); serta nilai bukti apakah yang ada di dalamnya (kredibilitas). Data yang valid tersebut kemudian disusun kembali, dengan melihat secara waktu dan pokok bahasan. Data ini kemudian diinterpretasi, dalam proses penafsiran data yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, sedangkan historiografi merupakan proses menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk penulisan sejarah yang sistematis.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang saling berkaitan, masing-masing membahas aspek-aspek penting yang mendukung pemahaman menyeluruh tentang interaksi sosial, perkembangan ekonomi, dan dinamika politik yang terjadi sebagai dampak dari transmigrasi masyarakat Bali di Kabupaten Konawe Selatan dalam rentang waktu 1968 hingga 2020. Sistematika penyusunan ini dirancang agar pembaca dapat menelusuri perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat Bali di daerah tersebut secara bertahap dan mendalam.

Bab pertama merupakan bagian Pendahuluan yang memuat unsur-unsur dasar dalam penelitian, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, tinjauan pustaka, serta landasan teori dan metode yang digunakan. Pada bab ini dijelaskan urgensi penelitian, khususnya dalam memandang transmigrasi masyarakat Bali bukan hanya sebagai kebijakan kependudukan, tetapi juga sebagai proses sosial yang kompleks, penuh dinamika antar kelompok dan perubahan struktur sosial lokal. Penelitian ini menggunakan kerangka teori sejarah sosial dan relasi antarkelompok, dengan metode kualitatif yang mengandalkan data primer dan sekunder sebagai sumber utama.



Bab kedua membahas secara menyeluruh kondisi wilayah Kabupaten Selatan, tempat di mana penelitian ini dilakukan. Di dalamnya dijelaskan letak geografis, jumlah penduduk, sejarah pembentukan wilayah, serta nilai sosial dan budaya masyarakat sebelum kedatangan para transmigran

Bali. Bab ini menjadi penting karena memberi gambaran awal yang dibutuhkan untuk memahami bagaimana interaksi antara warga lokal dan pendatang terjadi, serta sejauh mana perubahan sosial dan lingkungan muncul akibat perpindahan tersebut.

Bab ketiga membahas bagaimana hubungan sosial dan ekonomi terbentuk antara warga Bali yang datang sebagai transmigran dan masyarakat asli di Kabupaten Konawe Selatan. Interaksi antara kedua kelompok ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aktivitas pertanian dan kegiatan sosial seperti upacara agama, gotong royong, serta pernikahan lintas budaya. Hubungan yang dibangun tidak hanya bersifat resmi, tetapi juga melalui jalur kekeluargaan dan kebiasaan hidup bersama. Dalam bidang ekonomi, warga Bali dikenal rajin dan tekun, sehingga banyak di antara mereka yang sukses menjalankan usaha pertanian maupun pekerjaan lain yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Bab keempat membahas bagaimana masyarakat Bali sebagai transmigran mampu menyesuaikan diri secara budaya, sosial, dan politik dalam kehidupan masyarakat yang beragam di Konawe Selatan. Walaupun mereka datang dengan latar budaya yang berbeda, masyarakat Bali tetap bisa menyatu dengan warga lokal melalui proses penyesuaian, seperti mengikuti adat yang berlaku, bergabung dalam kegiatan lembaga desa, serta terlibat dalam urusan politik lokal. Adaptasi ini membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan memperkuat rasa kebersamaan.

Bab lima penutup yang berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan saran adalah masukan yang diharapkan penulis terhadap hasil penelitian.

Dengan sistematika ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai perjalanan panjang transmigrasi Bali, serta bagaimana fenomena tersebut membentuk wajah sosial dan ekonomi wilayah tujuan transmigrasi secara historis dan kontemporer.



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kabupaten Konawe Selatan hasil pemekaran dari Kota Kendari pada tahun 2003 disahkan dengan UU Nomor 4 tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Konawe Selatan Ibu Kotanya terletak di Andoolo. Kabupaten Konawe Selatan berada di bagian Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 03°58' dan 04°31' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121°58'-123°16' Bujur Timur.³⁵

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan wilayah administratif yang cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.³⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.

Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Konda, Kecamatan Moramo, Kecamatan Laonti, Kecamatan Kolono, Kecamatan Lainea, Kecamatan Palangga, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Andoolo, Kecamatan Angata, dan Kecamatan Landono.

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

³⁵ Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, (Jakarta. CV.Haji Mas Agung, 1987: 4).



Fitra Mailendra, "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor-ang Mempengaruhi Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat" Panel Data: Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Periode 2002-*kripsi*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009: 2).

8/DPRD/2001 tanggal 6 Juni 2001 dan pelaksanaan tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Dukungan Penyediaan Dana untuk Kabupaten Konawe Selatan, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Kendari berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Sumber: BPS Kabupaten Konawe Selatan 2020)

Arti Lambang Kabupaten Bentuk, Warna, Isi

- a. Bentuk lambang berupa perisai berwarna biru muda dikombinasikan warna coklat muda, garis tepi warna hitam dengan garis rata bagian atas dan cekung pada kedua sudut perisai, terdapat gambar Kalo Sara dan Gong didalamnya.



ar Kalo Sara dan Gong tersebut dibingkai dengan pada berwarna kuning
apas berwarna putih.

- c. Dibagian bawah perisai terdapat tulisan Konawe Selatan berwarna hitam dengan latar belakang pita berwarna kuning emas.
- d. Dibagian atas gambar pada dan kapas terdapat Bintang Lima.

Uraian Lambang

- a. Ukuran lebar dan tinggi perisai 4 (empat) berbanding 5 (lima) melambangkan proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945.
- b. Warna biru muda melambangkan potensi/kekayaan di perairan di wilayah konawe selatan.
- c. Warna coklat muda melambangkan potensi/kekayaan baik di permukaan maupun yang terkandung didalam bumi wilayah konawe selatan.
- d. Pada melambangkan kesejahteraan di bidang pangan
- e. Kapas melambangkan kesejahteraan di bidang pakaian
- f. Kalo Sara dan Gong melambangkan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat konawe selatan
- g. Bintang lima melambangkan sila-sila dalam pancasila sebagai Dasar Negara.³⁷

2.1. Batas dan luas wilayah

Berdasarkan letaknya Kabupaten Konawe Selatan berada di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Muna. Kabupaten Konawe Selatan memiliki sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia secara memadai kecuali sarana telekomunikasi tetapi saat ini sedang dibangun beberapa sarana telekomunikasi. Hubungan antara daerah atau wilayah Kabupaten, Propinsi dapat dijangkau dengan mudah karena berbagai sarana transportasi sudah tersedia dengan baik³⁸. Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 25 Kecamatan yaitu Tinanggea, Lalembu, Andoolo, Buke, Andoolo Barat, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Lainea, Laeya,

³⁷ BPS Kabupaten Konawe Selatan , *Kabupaten Konawe Selatan dalam*
Konawe Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan, 2020:



BPS, Kabupaten Konawe Selatan... (2020: 6).

Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua dan Basala.

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan, 451.421 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) $\pm$ 9.368 Km². Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau kecil yaitu Pulau Cempedak. Menurut Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Tinanggea 528 km² (11,70 persen), kemudian berturut-turut Kecamatan Angata (9,69 persen), Moramo (8,95 persen), kecamatan lainnya memiliki luas wilayah dibawah 8 persen. Kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Ranomeeto Barat (0,40 persen) dan Palangga (0,47 persen).

Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan garis ketinggian menurut hasil penelitian pada areal seluas 1.556.160 Ha, (termasuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan), Jenis tanah di Kabupaten Konawe Selatan meliputi Latosol dengan luas 363.380 Ha atau 23,35 persen, Padzolik seluas 438.110 Ha atau 28,15 persen, Organosol seluas 73.316 Ha atau 4,71 persen, Mediteran seluas 52.808 Ha atau 3,39 persen, Aluvial seluas 74.708 Ha atau 4,80 persen serta tanah Campuran seluas 553.838 Ha atau 35,59 persen.

Kabupaten Konawe Selatan mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti; Sungai Lapoa, Sungai Laeya, dan Sungai Roraya. Bendungan irigasi Benua Aporo mengairi sawah 2.602 Ha. Selain sungai-sungai yang telah disebutkan di atas terdapat pula Rawa Aopa yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat. Kabupaten Konawe Selatan memiliki perairan yang luas dan beberapa buah pulau kecil dengan potensi yang sangat menonjol yaitu kekayaan hasil laut disamping juga memiliki panorama yang indah. Oleh karena itu perairan Kabupaten Konawe Selatan sangat cocok untuk pengembangan usaha perikanan laut dan pengembangan wisata bahari.

a jenis ikan dari hasil perairan Kabupaten Konawe Selatan seperti

